

Istana: Anggarkan Rp8,3 Miliar Beli Mobil untuk Tamu Negara

JAKARTA (IM) - Layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan mencatat adanya pengadaan mobil untuk satuan kerja Istana Kepresidenan Jakarta senilai Rp8,3 miliar.

Pada situs LPSE Kementerian itu, pengadaan tersebut dengan kode tender 35735011 dan nama paket Pengadaan Kendaraan Bermotor tahun anggaran 2022. Tahap tender pun sudah selesai dengan pemenang yakni PT Satria Internusa Perkasa yang beralamat di Depok dengan harga penawaran Rp7,9 miliar.

Kepala Sekretaria Presiden, Heru Budi Hartono mengatakan bahwa pengadaan tersebut sudah direncanakan sejak lama dan untuk kegiatan kenegaraan. "Pengadaan kendaraan ini adalah untuk kegiatan kenegaraan dan tamu-tamu negara," ujar Heru kepada wartawan, Selasa (8/2).

Heru menjelaskan bahwa pengadaan mobil tersebut sudah direncanakan sejak tahun 2018 melalui proses kajian secara mendalam.

"Melalui proses kajian secara mendalam yang disusun bersama-sama dengan Biro

Umum, Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Wakil Presiden yang sudah disepakati proses pengadaan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2019 sampai tahun 2024," kata Heru.

Karena keterbatasan pagu, kata Heru, proses pengadaan mobil tersebut harus dilakukan secara bertahap. Dan anggaran untuk pengadaan mobil tersebut telah direncanakan sejak awal.

"Di samping itu, beberapa unit kendaraan yang diadakan merupakan peremajaan kendaraan yang telah dihapuskan pada tahun 2021 ini. Kendaraan ini juga untuk mendukung rangkaian kegiatan tamu negara. Hal ini sesuai dengan hasil kajian yang telah disusun sejak tahun 2018 tersebut," jelasnya.

Dalam pelaksanaannya, lanjut Heru, Istana mengutamakan aspek efektifitas dan akuntabilitas serta transparansi anggaran. "Dan tentunya kami menerima dan mempertimbangkan masukan apabila anggaran ini direlokasikan untuk kepentingan yang lebih prioritas/mendesak," ungkapnya. ● han

2 Polhukam

FOTO/ANT



KUNJUNGAN KERJA MENKO PMK KE PEKANBARU

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy (kanan) berdialog dengan warga saat melakukan kunjungan kerja ke Pekanbaru, Riau, Selasa (8/2). Menko PMK meninjau langsung program penerimaan Bantuan Sosial sekaligus membagikan langsung paket bantuan 'Kemenko PMK Peduli'.

Disahkan DPR, UU PPP Siap Akomodasi Metode Omnibus Law di UU Cipta Kerja

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak pengesahan revisi UU PPP. Anggota DPR dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf menilai pembahasan revisi UU PPP terburu-buru.

Bukhori Yusuf menilai pembahasan revisi UU PPP terburu-buru. Oleh karena itu, Fraksi PKS meminta pendalaman lebih lanjut terhadap revisi UU PPP tersebut.

"Kami Fraksi PKS menyatakan menolak untuk dilakukan pengambilan keputusan pada hari ini sebelum adanya perbaikan-perbaikan yang menjadi catatan penting Fraksi PKS terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk selanjutnya ditetapkan sebagai RUU usul DPR RI," kata Bukhori dalam rapat paripurna.

Sebelumnya diberitakan, Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui draf revisi UU PPP dalam rapat pleno Baleg DPR, Senin (7/2). Hanya Fraksi PKS yang menolak. Revisi UU PPP ini bertujuan untuk

mengakomodasi metode omnibus setelah UU Cipta Kerja yang dibentuk lewat metode tersebut dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK. Menurut MK, metode

penggabungan atau omnibus law dalam UU Cipta Kerja tidak jelas, apakah metode tersebut merupakan pembiasaan UU baru atau melakukan revisi. ● han



FOTO: ANT

PRASETYO EDI DIPERIKSA KPK TERKAIT FORMULA E

Ketua DPRD DKI Jakarta dari PDIP Prasetyo Edi Marsudi melambaikan tangan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (8/2). Prasetyo Edi diperiksa untuk menyelidiki mengenai anggaran Rp560 miliar yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait penyelenggaraan Balap Mobil Formula E yang akan diselenggarakan pada Maret 2022 mendatang.

DPR Menyetujui Pemerintah Menjual Dua Kapal Perang

JAKARTA (IM) - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui penjualan dua kapal perang. Persetujuan itu dipaparkan dalam Rapat Paripurna DPR ke-14 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022, Selasa (8/2).

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Anton Sukartono dalam laporannya di Rapat DPR RI menyampaikan laporan Komisi I DPR RI terkait penjualan barang milik negara (BMN) eks KRI Teluk Mandar 514 dan eks KRI Teluk Peny 513 pada Kementerian Pertahanan.

"Pembahasan persetujuan sudah dimulai sejak awal penguasaan rapat konsultasi pengganti Bamus pada 13 Januari 2022 untuk penjualan kedua kapal tersebut," ujar Anton Sukartono.

Menindaklanjuti penguasaan tersebut, Komisi I DPR RI dikatakannya pada 27 Januari 2022 telah melaksanakan rapat kerja dengan Kemenhan, Kemenkeu, dan Kasal untuk membahas penjualan kedua kapal tersebut.

"Setelah mendengar dan melakukan pendalaman, Kami menyetujui penjualan tersebut berdasarkan Surat Presiden RI Nomor R-52/Pres/X/2021 perihal permohonan persetujuan penjualan BMN berupa eks KRI Mandar 514 dan eks KRI Peny 513 sesuai peraturan perundang-undangan

yang berlaku," kata Anton Sukartono.

Anton Sukartono yang membacakan paparan dari Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid berharap agar dalam rapat paripurna bisa menyetujui penjualan kapal eks KRI Teluk Mandar-514 dan Kapal KRI Teluk Peny-513.

Sementara Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin rapat paripurna, kemudian menanyakan ke seluruh anggota DPR RI yang hadir secara fisik dan virtual.

"Kami menanyakan kepada sidang dewan terhormat apakah penjualan BMN tersebut dapat disetujui? Setuju (jawab anggota DPR). Terima kasih. Selanjutnya persetujuan Rapat Paripurna dewan terhadap laporan Komisi I DPR RI tersebut akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku," kata Sufmi Dasco Ahmad.

Dalam kesempatan itu Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan pelaksanaan rapat paripurna tersebut dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan dan pembatasan kehadiran karena Indonesia sudah menghadapi gelombang ketiga pandemi Covid-19.

"Menurut catatan Sekretariat Jenderal DPR yang hadir fisik 23 orang, virtual 210, ijin 87, jumlah 320 dari total 575 anggota DPR RI. Sehingga kuorum sudah tercapai," pungkasan Sufmi Dasco Ahmad. ● han

Satgas Pamtas Berikan Wawasan Kebangsaan bagi Pelajar di Perbatasan

PAPUA (IM) - Anggota Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Republik Indonesia-Papua Nugini, dari Yonif 126/KC menjadi tenaga pendidik di SD Kanandega, Kampung Banda, Distrik Waris, Kabupaten Keerom.

Informasi ini disampaikan Dansatgas Pamtas Yonif 126/Kala Cakti, Letkol Inf Dwi Widodo, S.H., M. Han, dalam rilis tertulisnya di Kabupaten Keerom, Papua, Selasa (8/2).

"Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Satgas dalam mendedikasikan anak-anak bangsa, seperti yang dilakukan oleh anggota

Pos Waris membantu pihak sekolah dengan mengajarkan materi Bahasa Indonesia dan wawasan kebangsaan, harapannya anak-anak bisa cerdas serta dapat menjadi generasi penerus bangsa Indonesia di kemudian hari," ujar Dansatgas.

Sementara itu, salah satu murid Kanandega Jerry mengatakan sangat senang sudah di ajarkan oleh Bapak TNI dengan cara belajar sambil bermain.

"Kami juga mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan bapak tentara yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada kami," ujarnya. ● mei

JAKARTA (IM) - Revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) disetujui menjadi usul inisiatif DPR.

Adapun revisi UU PPP ini dilakukan untuk mengakomodasi metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan setelah UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

"Tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan terhormat, apakah RUU usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang perubahan kedua

atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI?" kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bertanya kepada anggota dewan peserta rapat paripurna, Selasa (8/2).

"Setuju ...," jawab peserta rapat kompak yang kemudian diikuti ketukan palu oleh Dasco sebagai tanda RUU PPP telah disetujui DPR.

Tak semua fraksi DPR menyetujui revisi UU PPP. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak. Anggota DPR dari Fraksi PKS

Diperiksa KPK, Ketua DPRD DKI Jakarta Bawa Satu Bundel Dokumen Terkait Formula E

JAKARTA (IM) - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyelenggaraan Formula E yang akan digelar Pemprov DKI Jakarta.

Pria yang akrab disapa Pras ini datang dengan membawa satu bundel dokumen pendukung terkait Formula E.

"Satu bundel dokumen sudah saya siapkan mulai dari KUAPPAS, RAPBD sampai APBD," kata Pras dikutip dari akun Twitter resminya yang terverifikasi, @Prasetyoedimarsudi, Selasa, (8/2).

"Semua saya serahkan kepada penyidik KPK. Saya harap dokumen itu membantu KPK selama proses penyelidikan," ujarnya.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-

P) ini juga akan menyampaikan apa yang dia diketahui dalam proses penganggaran Formula E, yaitu mulai dari usulan, pembahasan, sampai pengesahan anggaran, kemudian bagaimana pembayaran commitment fee sebesar Rp 560 miliar yang dilakukan sebelum Peraturan Daerah APBD disahkan.

"Semoga keterangan yang saya berikan dapat mendukung upaya penuh @official.kpk dalam mengusut kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan @fiaformulac ini," ujarnya.

Sebelumnya Pras menyampaikan, bahwa commitment fee adalah biaya terbesar yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta dalam penyelenggaraan Formula E. "Pengeluaran terbesar Formula E saat ini sebesar Rp 560 miliar. Itu dipakai untuk pembayaran

commitment fee ke Formula E Operation (FEO)," kata Prasetyo dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (8/2).

Prasetyo mengatakan, commitment fee yang dibayar Jakarta paling besar dibandingkan kota di negara-negara lain. Kata dia, penyelenggaraan Formula E di Montreal, Kanada, hanya dikenai biaya nomination fees for the City of Montreal Rp 1,7 miliar dan race fees Rp 17 miliar, sehingga totalnya Rp 18,7 miliar.

Ia menilai, anggaran sebesar Rp 560 Miliar untuk program Formula E berpotensi hanya akan digunakan untuk satu kali penyelenggaraan di Jakarta. Sebab, menurut dia, gubernur yang akan datang tidak memiliki kewajiban untuk melanjutkan program Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. ● mei



FOTO: ANT

INDONESIA TUAN RUMAH KONGRES WCCJ

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) memberikan keterangan disaksikan Sekjen MK M Guntur Hamzah (kiri) dan Panitera MK Muhidin dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (8/2). Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia akan menjadi tuan rumah Kongres Ke-5 The World Conference on Constitutional Justice (WCCJ) atau Kongres Mahkamah Konstitusi Sedunia pada 4 hingga 8 Oktober 2022.

Mahfud Sebut Andalkan Pers untuk Dapat Dukungan Publik

JAKARTA (IM) - Hari Pers Nasional 2022 diperingati hari ini, Rabu (9/2). Kali ini tema HPN 2022 adalah soal lingkungan.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan, dirinya sebagai pejabat publik terus berbicara kepada media untuk mendapatkan dukungan publik dalam penetapan kebijakan di pemerintahan.

"Bagi saya pribadi sebagai Menko Polhukam, Ketika saya mengatakan sesuatu yang penting dan sensitif, kadang saya sampaikan dulu kepada pers, agar mendapat dukungan publik, seperti saat saya bicara BLBI, sebelum orang lain menanggapi saya sudah konferensi pers dulu, jadi publik mendukung, sehingga ke depan lebih gampang," kata Mahfud.

Demikian beberapa petikan penting yang disampaikan Menko Polhukam dalam pidato kuncinya secara daring pada hari kedua Konvensi Media Nasional, yang dikutip pada Selasa (8/2) yang diselenggarakan sebagai bagian dari Peringatan Hari Pers Nasional 2022, di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Acara hari kedua membahas tentang 'Membangun Model Media Massa yang Berkelanjutan,' dan dihadiri oleh Ketua Dewan Pers, Prof. Muhammad Nuh, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia Pusat, Atal S. Depari, Ketua Panitia Hari Pers Nasional 2022, Auri Jaya, jajaran Forkompinda Provinsi Sulawesi Tenggara, dan seluruh peserta Konvensi Nasional, yang hadir langsung di Kendari, serta secara daring.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menjelaskan bahwa arahan Presiden juga, dalam beberapa kali

sidang kabinet kepada para Menteri, agar berbicara kepada pers, bukan buat genit, tapi agar publik tahu bahwa Menteri bekerja, agar rakyat tahu, mendapat masukan, dan mendapat kritik yang obyektif.

"Ada saja orang yang pesimis bahwa BLBI yang sudah 22 tahun akan sulit dan tidak ada perkembangan, sebelum itu saya minta dukungan pers dulu agar kami kuat. Alhamdulillah Satgas BLBI sudah 7 bulan bekerja sudah terkumpul 20 triliun," itu semua antara lain karena peran pers lanjutnya.

Di sisi lain, Mahfud menggaris bawahi bahwa membangun model media masa berkelanjutan tidak bisa dilepaskan dari kedisiplinan pekerja pers dalam mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme dan kualitas mereka. Bila ingin terus berkelanjutan menjadi pilihan publik yang terpercaya, menu-rutnya, pers tidak seharusnya menerapkan praktik jurnalisme yang menggampangkan proses dan menurunkan kualitas.

Seperti, mulai dari menulis tanpa konfirmasi, menulis secara sepihak atau tidak cover both sides, memberi pemaknaan keliru pada sebuah peristiwa, memilih nara sumber yang tidak kredibel, hingga praktik Clickbait dengan membuat judul-judul berita yang menggoda namun melencengkan maknanya.

"Tindakan seperti ini adalah praktik yang perlahan tapi pasti menggerus tingkat kepercayaan publik terhadap media, yang sejatinya menjauhkan upaya kita semua untuk membangun model media masa berkelanjutan," ujarnya.

Menurut Mahfud, bila media masa menjalankan tugasnya dengan baik dan profesional, di mana para jurnalis. ● han

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT PERMADANI KHATULISTIWA NUSANTARA ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/ Tanggal : Jumat, 25 Februari 2022
Waktu : Pukul 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Rajawali Place (d/h Four Seasons Hotel Jakarta)
Jl. HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan dan Konferensi Video.

Agenda RUPS LB : "Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan"

Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS LB telah tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal hari ini sampai dengan tanggal RUPS LB diadakan.

Pemanggilan ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Catatan :

- Para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS LB adalah mereka yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sampai dengan tanggal Pemanggilan RUPS LB ini.
- Para Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam RUPS LB dapat menunjuk kuasanya untuk hadir dan memberikan suara atas namanya dalam RUPS LB dengan menyerahkan Surat Kuasa yang sah. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa dari para Pemegang Saham Perseroan dalam RUPS LB, namun dengan ketentuan bahwa suara yang dikeluarkan oleh mereka selaku kuasa tidak dapat dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan / kuorum dalam RUPS LB.
- Salinan Surat Kuasa tersebut harus telah diterima oleh Perseroan paling lambat pada tanggal RUPS LB.
- Asli Surat Kuasa yang diberikan oleh Pemegang Saham Perseroan tersebut dan salinan kartu tanda pengenal dari kuasanya yang sah harus telah diserahkan kepada Perseroan sebelum kuasa tersebut hadir dalam RUPS LB.
- Demi terselenggaranya RUPS LB secara efisien dan teratur, para Pemegang Saham Perseroan atau kuasa para Pemegang Saham Perseroan dimohon untuk hadir di tempat maupun melalui media konferensi video RUPS LB paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPS LB dimulai.

Jakarta, 9 Februari 2022
Hormat kami,
Direksi PT Permadani Khatulistiwa Nusantara